



Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Dan Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut

Nahdi Hadiyanto

Universitas Garut, Dosen Ilmu Administrasi Negara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru dan Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 80 sekolah yang berstatus negeri yang tersebar di kabupaten Garut. Penarikan sampel menggunakan teknik *Cluster Random Sampling* dan jumlah sampel sebanyak 45 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumentasi sedangkan analisis statistika dengan model analisis jalur.

Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah memberi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa yaitu sebesar 27,81%, sedangkan pengaruh di luar Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebesar 72,19%. Adapun hasil pengujian sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa diantara masing-masing variabel memberikan pengaruh secara positif dan signifikan.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah, kinerja guru, partisipasi orang tua, prestasi belajar

1. Pendahuluan

Dunia pendidikan selalu dinamis dan akomodatif seakan tak surut dari berbagai persoalan, selalu berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan yang begitu cepat. Bukan hanya persoalan esensi dari pendidikan itu sendiri tetapi juga menyangkut sarana, fasilitas dan juga proses pembelajaran yang efektif dan efisien dan diupayakan tepat kearah tujuan yang ingin dicapai.

Dalam beberapa dasawarsa ini sejumlah negara berkembang, dengan dukungan bantuan internasional, telah melakukan upaya besar-besaran untuk menyekolahkan anak-anak usia sekolah, pencapaian pendidikan, terutama pendidikan dasar dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan standar kehidupan negaraberkembang serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Menurut analisis sejumlah pakar dan praktisi pendidikan di Indonesia, saat ini paling tidak, ada enam persoalan pokok yang harus dipikirkan secara kontekstual di daerah bersangkutan, yakni

mutu pendidikan, efisiensi, pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas pendidikan.

Meskipun desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan, namun dalam realisasinya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan satu tindakan yang agak tergesa-gesa dan tidak siap. Hal ini bisa dilihat dari belum memadainya sumberdaya manusia, sarana prasarana, manajemen pendidikan yang belum optimal, serta sekian banyak permasalahan yang masih dihadapi oleh dunia pendidikan di daerah.

Diantara persoalan yang dihadapi pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, jumlah guru serta kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, dan lain-lain merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemahaman dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah tentang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya menjawab berbagai permasalahan tersebut.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini berkaitan dengan jaminan pemerintah akan terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas Nasional (UU SISDIKNAS) pasal 34. BOS ini merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia baik negeri maupun swasta. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.

Keadaan demikian bagi sekolah merupakan buah simalakama. Disatu sisi sekolah ingin mengajak masyarakat berpartisipasi membiayai pendidikan, tetapi masyarakat mengandalkan pada Bantuan Operasional Sekolah secara berlebihan. Sementara jika sekolah membebaskan seluruh biaya pendidikan kepada masyarakat tetapi kenyataannya bahwa BOS ternyata jauh dari dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Realita ini diperparah dengan kakunya (*rigid*) petunjuk teknis dari pemerintah yang mengatur pemanfaatan dana tersebut. Padahal dalam UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan dengan jelas bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ditengah perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap BOS tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji kebijakan tersebut dari sisi yang lain. Dalam hal ini yaitu pengaruh implementasi kebijakan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap peningkatan kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada sekolah menengah pertama khususnya di kabupaten Garut.

Apabila diperhatikan sekilas kebijakan tersebut, terlihat memang bantuan tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat. Namun demikian terdapat sejumlah variabel lain yang patut diperhatikan dan menjadi pertimbangan terutama bagi para pembuat kebijakan yaitu pengaruh pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain terhadap : Kinerja guru, Partisipasi orang tua siswa, dan Prestasi belajar siswa.

Menarik untuk dikaji lebih jauh adalah hasil penelitian dari Lembaga Penelitian SMERU (2005) bekerjasama dengan *World Bank* tentang Penentu Kinerja Murid Sekolah Dasar di Indonesia : Peranan Guru dan Sekolah. Hasil penelitian tersebut antara lain adalah berbagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja murid, yaitu variabel guru (ketidakhadiran guru, pengalaman guru, pekerjaan guru di luar sekolah, dan proporsi guru perempuan), kondisi dan karakteristik sekolah (bahasa pengantar di sekolah, besarnya kelas, rasio guru dan murid, jarak sekolah, fasilitas sekolah), pengelolaan sekolah dan alokasi keuangan.

Dengan demikian, faktor kinerja guru merupakan salah satu indikator penting bagi peningkatan kinerja/prestasi murid/siswa. Walaupun masih perlu dilakukan penelitian lebih jauh besarnya kebutuhan atau biaya operasional sekolah sehingga peranan orang tua siswa dalam hal ini diperlukan baik sebagai penopang keberlangsungan operasional sekolah maupun dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa dalam peningkatan prestasi belajarnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, muncul pertanyaan apakah Implementasi Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut dapat memberikan perubahan atas kinerja Guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa SMP khususnya di Kabupaten Garut ?

Hal ini perlu penelitian lebih lanjut, mengingat besarnya dana yang telah dan harus dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan implementasi program tersebut. Disamping itu, harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masih rendahnya kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa yang berimplikasi terhadap prestasi siswa yang menjadi ukuran kualitas pendidikan secara umum di Indonesia yang kabarnya sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas dengan judul : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Kinerja Guru dan Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Garut”.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan sejumlah data-data tersebut dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah : prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Garut beum ada peningkatan yang signifikan. Hal ini diduga antara lain masih rendahnya kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa, sehingga Implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah belum optimal. Dengan demikian maka dapat dirumuskan pertanyaan masalah (*problem question*) sebagai berikut : Adakah Pengaruh pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?

Selanjutnya pertanyaan masalah penelitian tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Adakah Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?
2. Adakah Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap partisipasi orang tua siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?
3. Adakah Pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?
4. Adakah Pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?
5. Adakah Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut ?

3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kinerja guru serta tingkat partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat dan untuk menguji Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap

Peningkatan Kinerja Guru dan Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.

4 Kerangka Pemikiran

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (LAN RI, 1997). Ini berarti bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bagi pejabat publik untuk melaksanakan kegiatan sebagai pertanggungjawabannya kepada publik. Pedoman ini sekaligus menjadi acuan bagi pejabat publik untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Iskandar, 2005).

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan kebijakan yang disusun/dirancang/dibuat oleh pemerintah sesuatu negara yang kemudian diimplementasikan melalui aparatur pemerintah dalam rangka upaya mencapai sejumlah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (singadilaga, 2005). Hasil implementasi kebijakan publik tersebut menimbulkan dampak (*impact*) atas kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Singadilaga, 2005) bahwa “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”.

Sementara kebijakan publik menurut Lasswell dan Kaplan (dalam Iskandar, 2005) adalah : “*a projected, program of goals values and practices, the policy process is the formulation, promulgation, and application of identification, demand and expectation concerning the future interpersonal relation of the saelf*”. Anderson (dalam Iskandar, 2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

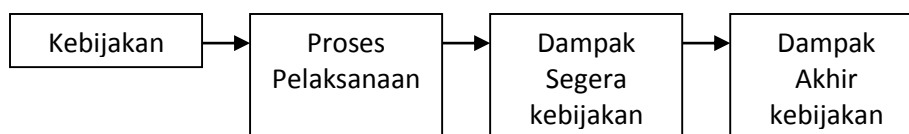
Menurut Anderson (dalam Iskandar, 2005), implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah :

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan-kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- d. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
- e. Kebijakan publik dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoratif*)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor, langkah demi langkah sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2005).

Agar implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan, maka prosesnya harus sesuai dengan dimensinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Dunn (1996 : 80) bahwa implementasi kebijakan meliputi sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian kebijakan.

Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Secara skematis, proses implementasi kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Proses Implementasi Kebijakan Publik
(Sumber : Iskandar, 2005 : 215)

Edwards (dalam Winarno, 2005 : 125) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Iskandar (2001:115) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam *public policy* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara, baik secara pribadi maupun berkelompok yang direncanakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat dilakukan baik terorganisasi maupun atau spontanitas, baik terus menerus maupun sporadis.

Sebagai sebuah organisasi, sekolah dalam mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya sangat tergantung pada tingkat kinerja yang bersangkutan dalam mengerjakan sesuatu. Tingkat kinerja ini dilakukan antara lain oleh kemauan (*motivation*) dan kemampuan (*capability*) yang dimiliki para pengurusnya.

Pada aspek kemauan (*motivation*) terkandung unsur bertanggungjawab, motivasi untuk berprestasi dan keterikatan, dalam hal ini Winardi (2001:2) mengungkapkan sebagai berikut :

Seseorang yang sangat termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi dimana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam hal bekerja. Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja kerja individual.

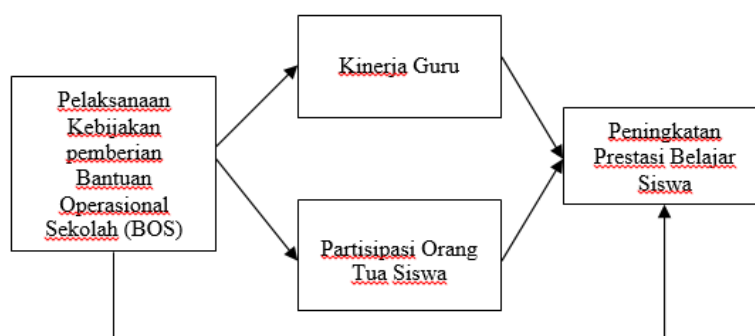
Dalam menampilkan kinerja yang baik akan meraih kemajuan namun apabila sebaliknya, akan gagal. Tentang kinerja ini Siagian berpendapat sebagai berikut :

Pada tingkat yang dominan, berhasil tidaknya organisasi atau perusahaan meraih kemajuan dalam berbagai bentuk dan manifestasi ditentukan oleh kinerja mereka. Sebaliknya kegagalan dan kurangberhasilan perusahaan mencapai tujuan dan berbagai sasarannya harus dilihat sebagai kegagalan atau kurangberhasilan kelompok manajemen untuk menampilkan kinerja yang memuaskan yang menuntut pertanggungjawaban (Siagian, 1997:30).

Tentu saja kinerja organisasi dipengaruhi oleh anggota-anggota individu dalam organisasi itu. Dengan demikian dalam organisasi sekolah, prestasi sekolah/siswa juga dipengaruhi oleh kinerja guru sebagaimana kinerja guru juga akan dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini BOS serta interaksi dengan masyarakatnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Operasional Siswa dalam implementasinya akan berperan signifikan atau diduga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa sehingga pada gilirannya akan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dirumuskan dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. Model Penelitian

5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa “Terdapat Pengaruh pelaksanaan kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Negeri Pertama di Kabupaten Garut”.

Selanjutnya hipotesis utama tersebut dirinci ke dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.
2. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap partisipasi orang tua siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.
3. Terdapat pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.
4. Terdapat pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.
5. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.

6 Tinjauan Teoritik

6.1 Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Dalam uraian tentang tinjauan pustaka ini akan dibahas *Grand Theory* mengenai Administrasi Negara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kebijakan Publik dan Sistem Pendidikan sebagai *Middle Range Theory*, serta dalam *Operational Theory* akan dibahas tentang Kinerja Guru dan Partisipasi Masyarakat dalam hal ini Orang Tua Siswa dalam kaitannya dengan Peningkatan Prestasi Belajar Siswa.

Tinjauan Tentang Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (LAN RI, 1997). Ini berarti bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bagi pejabat publik untuk melaksanakan kegiatan sebagai

pertanggungjawaban kepada publik. Pedoman ini sekaligus menjadi acuan pejabat publik untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Iskandar, 2005).

Sebagai kegiatan lanjutan dari suatu proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) maka dilakukan implementasi kebijakan (*policy implementation*) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meliputi (Dunn, 2000:80) sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian kebijakan.

Dimensi pertama yaitu sosialisasi kebijakan terdiri dari empat indikator yang akan diteliti yaitu materi pembinaan, waktu pelaksanaan, pemahaman materi dan tenaga pelaksana. *Dimensi kedua* yaitu pelaksanaan kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu tahap persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Dimensi ketiga* yaitu pengendalian kebijakan terdiri dari tiga indikator yaitu monitoring, evaluasi, dan supervisi.

Dari tiga dimensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan apakah variabel implementasi kebijakan pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah sebagai wujud kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM) telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan ditetapkan pemerintah.

6.2 Tinjauan Tentang Kinerja Guru

Kinerja (*performance*) mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Mengenai kinerja personal, erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar kinerja atau standar *performance*. Sayle dan Snamss (dalam Sedarmayanti, 2001:50) mengemukakan sebagai berikut :

Manager expected to be held to standard of accountability and most managers prefer to have their establish energies. In effect, the standard established a target and at the end of the target period (week, month, or year) both manager and boss can compare the expected standard of performance with the actual level of achievement.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menyangkut kinerja adalah berkaitan dengan efektivitas dan produktivitas dari segala macam aktivitas guru dalam melaksanakan tugas pokoknya agar mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. “istilah produktivitas diartikan secara beragam, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Ada yang mengidentikkan makna produktivitas dengan produksi, memandang produktivitas sebagai ukuran besarnya biaya sumber daya dan menyamakan produktivitas dengan prestasi kerja” (Putri dalam Thoha, 1996:2)

Makna produktivitas, tidak hanya terbatas pada produksi, besar biaya dan prestasi kerja melainkan lebih luas dan menyeluruh, produktivitas didefinisikan sebagai hasil yang didapat dari setiap proses produksi yang menggunakan satu lebih faktor produksi (Kohler dalam Thoha, 1996:7)

Dari beberapa pendapat tentang pengertian kinerja maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja guru menyangkut proses, hasil dan dampak yang dapat menjadi indikator yang dapat dipakai dalam dimensi penelitian ini adalah efektivitas dan produktivitas sehingga dapat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dalam pendidikannya.

6.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Orang Tua Siswa

Terdapat berbagai faktor situasi yang mempengaruhi keberhasilan program partisipasi, faktor itu mungkin ditemukan dalam lingkungan, organisasi, kepemimpinan, teknologi, atau pegawai (Davis & Newstroong, 1985:187).

Memang diperlukan partisipasi dalam setiap pembangunan termasuk didalamnya tentang pendidikan. Oleh karena itu dalam pengelolaan pembangunan harus didukung dengan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjoyo (1996:222) sebagai berikut :

Bahwa pembangunan yang meliputi segala kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang berupa partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara. Tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, perencanaan, pemimpin pelaksana operasional, tetapi juga dari para petani-petani yang masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

Partisipasi ini merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan termasuk bidang pendidikan, agar sesuatu tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah namun dapat tumbuh gotong royong, hal ini selaras dengan pendapat sebagai berikut : “Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal utama dalam potensi yang esensial dalam pelaksanaan pembangunan sektoral yang selanjutnya telah tumbuh dan berkembang menjadi besar bagi kelangsungan pembangunan nasional”. (Sastropoetro,1996:19).

Ada lima dimensi partisipasi yang di bahas oleh Cary (dalam Iskandar, 2003:313) yaitu : “a) *prequesites to participation*, b) *types of participation*, c) *types of participant*, d) *relationship of participant to locality*, and, e) *tages of organizations as they related to participation*”.

Partisipasi dalam kaitannya dengan bidang pendidikan sehubungan dengan implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah kerjasama yang erat antara perencana sekolah dan masyarakat dalam merencanakan dalam hal ini bisa melibatkan peranan komite sekolah sebagai representatif perwakilan pemangku kepentingan pendidikan di sekolah yang bersangkutan dengan pelibatan unsur tokoh masyarakat dan orang tua siswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan. Uphoff (1997:7) mengemukakan bahwa : “kerangka kerja merekonstruksi partisipasi mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan”.

Selanjutnya dikaitkan dengan pembangunan negara yang perlu mengembangkan partisipasi meliputi : ” partisipasi dalam mengambil keputusan, partisipasi memperoleh keuntungan, partisipasi dalam mengevaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka partisipasi orang tua siswa dalam konteks Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah kesadaran dan kepedulian aktivitas-aktivitas untuk turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan suatu program pendidikan di sekolah secara proporsional yang dilandasi musyawarah dan kesepakatan.

6.4 Tinjauan Tentang Prestasi Belajar Siswa

Hakikat proses belajar bertitik tolak dari suatu konsep bahwa belajar merupakan perubahan perbuatan melalui aktivitas, praktik dan pengalaman. Dua faktor utama yang menentukan proses belajar adalah heriditas dan lingkungan (Hamalik,1992:55).

Prestasi belajar merupakan aspek kecakapan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa dan hasil usaha dari kegiatan belajar yang ditempuh. Dengan demikian prestasi belajar merupakan suatu hal yang sangat penting dari keseluruhan proses pendidikan pada umumnya dan proses belajar pada khususnya.

Syah (2005:44) mengemukakan tentang pengertian prestasi belajar yaitu : kecakapan nyata yang menunjukkan kepada aspek kecakapan yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji karena merupakan hasil usaha yang bersangkutan dengan cara, bahan, dan hal-hal tertentu yang dijalaninya.

Prestasi belajar dapat dilihat dari segi hasil dan suksesnya belajar. Howard Kingsley (dalam Rusyan :28) membagi tiga macam hasil belajar yaitu : 1) keterampilan dan kebiasaan; 2) pengetahuan dan keterampilan; 3) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne mengemukakan lima kategori tipe kesuksesan belajar, yaitu : 1) *verbal information*; 2) *intelectual Skill*; 3) *cognitive strategic*; 4) *attitude*; 5) *motor skill*.

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah ras murid, sangat sulit. Hal ini

disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat *Intangible* (tidak dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa. Berdasarkan uraian tersebut, maka prestasi belajar siswa dengan beberapa pendekatan dimensi yaitu :

Efektifitas Proses Belajar dengan indikator : cerdas dan terampil dalam kognitif, afektif dan psikomotor, tanggung jawab dan mandiri dan kreatif dan inovatif.

Hasil Belajar Siswa dengan indikator : peningkatan cara belajar, peningkatan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM), peningkatan hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan peningkatan penilaian Ujian Akhir Nasional (UAN).

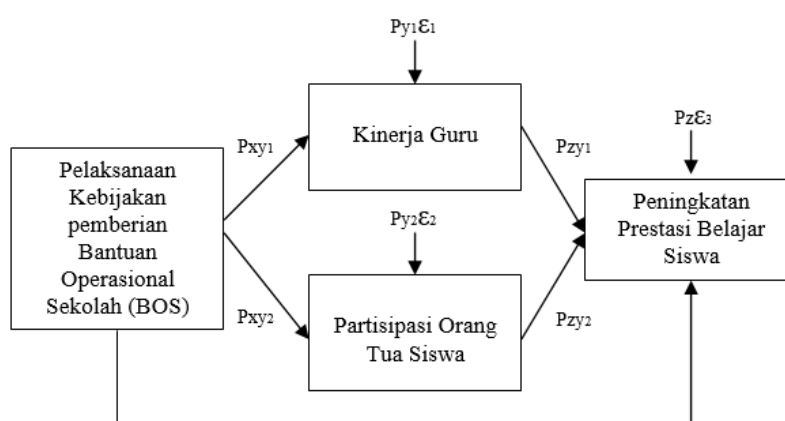
7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan (*Policy Research*), dalam hal ini penelitian dimlai dari asumsi adanya masalah dalam bidang pengelolaan pendidikan, khususnya pengaruh implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah terhadap peningkatan kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam rangka peningkatan prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif, karena substansi dari penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selain itu informasi atau data yang akan dikumpulkan berasal dari berbagai individu sebagai sampel atas populasi yang diteliti dengan menggunakan alat bantu kuesioner.

7.1 Paradigma Penelitian

Berdasarkan variabel penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka untuk lebih jelasnya hubungan keempat variabel diatas secara sistematis dapat digambarkan struktur paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 3. Paradigma Penelitian

Garis Pxy1 menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel X (implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah) dengan variabel Y1 (kinerja guru). Garis Pxy2 menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel X (implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah) dengan variabel Y2 (partisipasi orang tua siswa). Garis Pzy1 menunjukkan

hubungan kausalitas antara variabel Y1 (kinerja guru) dengan variabel Z (prestasi belajar siswa). Garis Pzy2 menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel Y2 (partisipasi orang tua siswa) dengan variabel Z (prestasi belajar siswa). Sementara itu Py1ε1, Py2ε2 dan Pzε3 merupakan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh namun tidak diteliti baik terhadap variabel Y1 (kinerja guru), variabel Y2 (partisipasi orang tua siswa) maupun variabel Z (prestasi belajar siswa).

7.2 Populasi

Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri tertentu, dalam suatu penelitian tidak selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena tidak mungkin melakukan penelitian terhadap semua populasi (Iskandar, 2005:230)

Populasi merupakan objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dari suatu penelitian. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri diseluruh kecamatan di Kabupaten Garut sebanyak 80 sekolah.

7.3 Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*, yaitu teknik menarik sampel dari kelompok-kelompok yang kecil atau cluster. Populasi dari cluster merupakan sub populasi dari total populasi. (Iskandar, 2005:233).

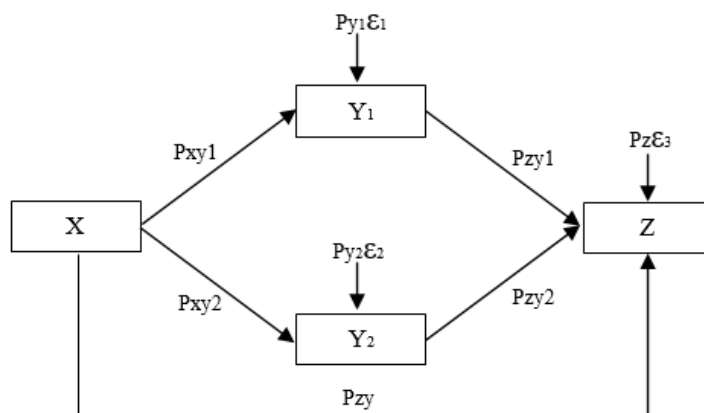
Sampel yang digunakan dalam hal ini adalah SMP Negeri penerima Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Garut. Dari total 80 SMP Negeri yang menerima BOS dan tersebar di 42 Kecamatan hanya diambil sebagian untuk dijadikan sebagai sampel dengan melihat populasi masing-masing kecamatan yang diambil secara acak. Ukuran sampel ditentukan dengan melalui rumus *Slovin* dan didapat sejumlah 45 Kepala Sekolah SMP Negeri dikabupaten Garut.

7.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul lalu ditabulasikan, kemudian dianalisis secara deskriptif maupun statistik. Dalam menganalisis secara deskriptif, digunakan bantuan tabel dalam bentuk jumlah dan prosentase.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini dengan model analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur menganalisis mengenai hubungan kausal yang tujuannya memisahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung suatu variabel (X) terhadap variabel (Y) dan variabel (Z).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh menurut analisis jalur adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Model Analisis Jalur

8 Pengujian Hipotesis Penelitian

8.1 Pengujian Hipotesis Utama (Pengaruh X terhadap Y dan Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) terhadap peningkatan Kinerja Guru (Y_1) dan Partisipasi Orang Tua Siswa (Y_2) dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SMPN di Kabupaten Garut”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,5231

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y_1, Y_2 dan Z, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,0698$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja guru (Y_1), partisipasi orang tua siswa (Y_2) dan Prestasi Belajar Siswa (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi (R^2_{yzx}) sebesar 0,2781. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y_1), partisipasi orang tua siswa (Y_2) dan Prestasi Belajar Siswa (Z). Sebesar 27,81%, sedangkan sisanya (P_{yze})² sebesar 72,19% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

8.2 Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh X terhadap Y_1)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6990.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y_1 , , maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 6,4105$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja guru (Y_1).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi ($R^2_{y_1x}$) sebesar 0,6990. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y_1) sebesar 48,87% sedangkan sisanya (P_{y_1xe})² sebesar 51,13% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

8.3 Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh X terhadap Y_2)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap partisipasi orang tua siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7344.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y_2 , , maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan

pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 7,0587$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel partisipasi orang tua siswa (Y_2).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi ($R^2_{y_2x}$) sebesar 0,7344. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y_1) sebesar 53,94%, sedangkan sisanya ($P_{y_2x\epsilon}$)² sebesar 46,06% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

8.4 Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh Y_1 terhadap Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “Terdapat pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,4262

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y_1 terhadap Z, , maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,0891$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel kinerja guru (Y_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Prestasi Belajar Siswa (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi ($R^2_{y_1z}$) sebesar 0,4262. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja guru (Y_1) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa (Z) sebesar 18,16%, sedangkan sisanya ($P_{y_1z\epsilon}$)² sebesar 81,84% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Kinerja Guru, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

8.5 Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh Y_2 terhadap Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “Terdapat pengaruh partisipasi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6575.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y_2 terhadap Z, , maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 5,7222$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Partisipasi Orang Tua Siswa (Y_2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Prestasi Belajar Siswa (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi ($R^2_{y_2z}$) sebesar 0,6575. Nilai ini menunjukkan bahwa Partisipasi Orang Tua Siswa (Y_2) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa (Z) sebesar 43,23%, sedangkan sisanya ($P_{y_2z\epsilon}$)² sebesar 56,77% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Partisipasi Orang Tua Siswa, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

8.6 Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh X terhadap Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : “Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap peningkatan prestasi

belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri". Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6026. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Z, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,9512$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,6811$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Prestasi Belajar Siswa (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien Determinasi (R^2_{zx}) sebesar 0,6026. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (X) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa (Z). Sebesar 36,32%, sedangkan sisanya $(P_{zx\epsilon})^2$ sebesar 63,69% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel Implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah, yang tidak dimasukkan ke dalam model.

9 Kesimpulan

Hasil Pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Peningkatan Kinerja Guru dan Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa. Sedangkan hasil pengujian sub hipotesis menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh secara secara positif dan signifikan terhadap variabel Peningkatan Kinerja Guru, begitu juga Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh secara secara positif dan signifikan terhadap variabel Partisipasi Orang Tua Siswa, serta diketahui juga bahwa Kinerja Guru berpengaruh secara secara positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar Siswa dan Partisipasi Orang Tua Siswa berpengaruh secara secara positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar Siswa dan diketahui juga bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh secara secara positif dan signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.

Daftar Pustaka

Buku

- Arcaro, Jerome S. 2006, *Quality in Education : An Implementation Handbook*. Edisi Ketiga. Alih Bahasa oleh Yosol Iriantara. Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Damin, Sudarwan. 2005. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gajah Mada University Press, Jogjakarta
- Fatah, Nanang. 2004a. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Edisi ketujuh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2004b. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Komite Sekolah*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Gulo, W. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Edisi Ketiga. Grasindo, Jakarta
- Hamalik, Oemar. 2004. *Proses Belajar Mengajar*. Edisi Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta

- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Press, Jakarta
- Iskandar, Jusman. 2005a. *Metoda Penelitian Administrasi*, Puspaga, Bandung
- . 2005b. *Dinamika Kelompok, Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Edisi Ketujuh. Puspaga, Bandung
- . 2005c. *Manajemen Publik*. Edisi Kelima. Puspaga, Bandung
- . 2005d. *Kapita Selekta : Administrasi negara dan Kebijakan Publik*. Puspaga, Bandung
- . 2006e. *Teori Sosial*. Edisi Kedelapan. Puspaga, Bandung
- Islamy, Irfan. 1998. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Munandar, Utami. 1999. *Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Permadi, Dadi. 1998. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah*. PT. Sarana Karya Panca Nusa, Bandung.
- Rusyan, Tabrani. 2001. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Nine Karya Jaya, Jakarta.
- Sagala, Syaiful. 2000. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Alfabeta, Bandung.
- Sudjana, Rahmat. 2002. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun menyongsong pencaangan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun 2006/2007*. Makalah, Garut.
- Surya, Moh. 2004. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Syah, Muhibbin. 2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Rosda, Bandung.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung
- Singadilaga, Duddy. 2006. *Himpunan Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Program Pascasarjana, UNIGA
- Tjokroamidjoyo, Bintoro dan Mustapadidjaya. 1996. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*. PT. Pustaka. LP3ES, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ketiga. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winardy. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Jurnal Lembaga Penelitian SMERU.2006. *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)2005*.
- Jurnal Lembaga Penelitian SMERU.2006. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*
- Jurnal Lembaga Penelitian SMERU bekerjasama dengan WORLD BANK .2005. *Tentang Penentu Kinerja Murid Sekolah Dasar di Indonesia : Peranan Guru dan Sekolah*.

Dokumen

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.